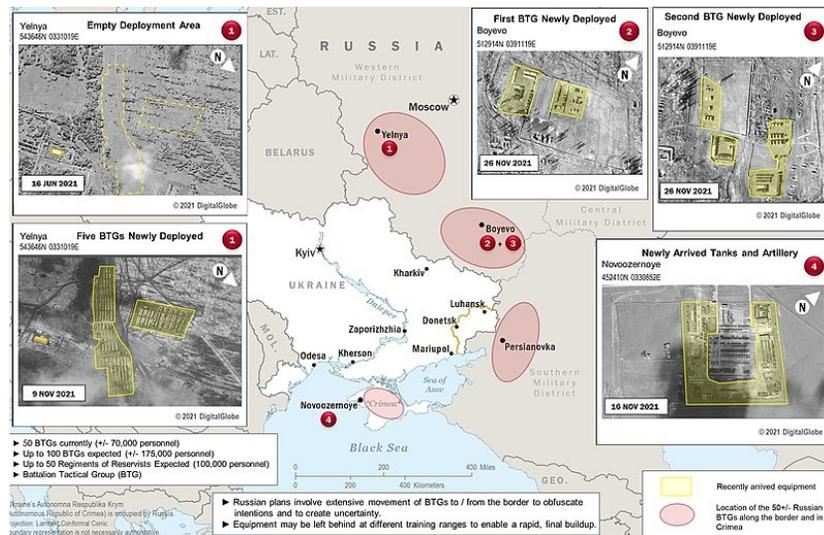


**ANALISIS KEPEMIMPINAN VLADIMIR PUTIN DALAM KEBIJAKAN
PERANG RUSIA-UKRAINA 2021-2023: PENDEKATAN SMALL THEORY:
HOLSTI**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sejak akhir tahun 2021 Rusia telah memindahkan pasukannya secara bertahap ke perbatasan utara Ukraina, tepat di wilayah Belarusia untuk melakukan latihan militer bersama yang dinamakan *United Resolve* dicanangkan akan mulai pada bulan Februari 2022 kemudian menimbulkan ketakutan di wilayah barat dengan tersebarnya berita menunjukkan banyaknya artileri dan kendaraan militer tiba di gerbong datar milik perusahaan kereta api Rusia di Belarusia (Dan Sabbagh, 2022). Gerakan yang dilakukan oleh Rusia ini jelas mengancam invasi potensial yang dapat memicu konflik terbesar di Eropa selama beberapa dekade. Tuduhan keras terhadap kemungkinan Rusia menginvasi Ukraina sebab adanya kegiatan latihan militer bersama secara tegas dibantah oleh para pejabat tinggi negara pecahan Uni Soviet tersebut. Pada bulan Januari 2022, intelijen AS telah menyimpulkan bahwa Rusia sudah mengerahkan operasi ke Ukraina timur yang dikuasai pemberontak untuk melakukan tindakan sabotase di sana dan menyalahkan AS pada Ukraina dalam “*false-flag operation*” atau operasi bendera palsu untuk menciptakan dalih terkait kemungkinan invasi. Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menolak klaim AS sebagai “*total disinformation*”.



Di tengah meningkatnya ketegangan atas penumpukan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina yang telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya invasi, Rusia terus membantah rencana untuk menyerang negara tetangganya, melainkan menuntut balik agar Barat memberikan satu set jaminan hukum yang menghalangi ekspansi NATO ke Ukraina serta negara - negara bekas Uni Soviet lainnya untuk menghentikan penempatan militer di Eropa Tengah dan Timur yang disebut sebagai pakta perjanjian keamanan. Dokumen pakta perjanjian keamanan yang diserahkan ke AS dan sekutunya pada bulan December 2021 tersebut menyerukan larangan pengiriman kapal perang maupun pesawat AS dan Rusia ke daerah-daerah dimana mereka dapat menyerang wilayah satu sama lain dan menuntut pembatalan latihan aliansi di dekat Rusia. Bukan hanya itu, Putin juga mengungkapkan pandangan *Russia irredentist* dan mempertanyakan hak Ukraina untuk eksis, dengan menyatakan bahwa negara Ukraina didirikan oleh Vladimir Lenin di bawah Uni Soviet (Vorobyov, 2022).

Tuntutan pakta keamanan Rusia kemudian ditolak oleh AS dan NATO secara tegas. AS menekankan bahwa Rusia tidak mempunyai hak apapun untuk dapat menentukan bagaimana urusan masa depan dan ekspansi organisasi ini (Steven Erlanger, 2022). Dokumen pakta keamanan tersebut menunjukkan bahwa AS memberikan tawaran untuk adanya transparansi terkait penyebaran rudal di Eropa Timur, namun Vladimir Putin jelas menolak dan menganggap bahwa AS telah mengabaikan pakta keamanan yang ia ajukan. Hal ini semakin menguatkan hambatan

untuk terciptanya sebuah resolusi antara negara - negara *super power* tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menyatakan bahwa hubungan Rusia dengan AS dan sekutu NATO-nya telah mendekati “*dangerous point*”, dimana titik bahaya yang dimaksud merupakan sebuah tanda akan adanya situasi panas merujuk pada sebuah peperangan. Sementara itu, pemerintahan Biden memerintahkan 3.000 tentara tambahan ke Eropa Timur yang sebelumnya juga telah mengirimkan Delegasi Senator nya untuk mengunjungi Ukraina dalam upaya menekankan dukungan AS bagi negara tersebut.

Pada 21 Februari 2022, Rusia yang sudah secara resmi mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk dengan terbuka mengirim pasukan Rusia ke wilayah yang dikuasai separatis Ukraina tersebut (BBC, 2022). Tiga hari setelahnya, tepat pada tanggal 24 Februari 2022, Putin mengumumkan pada dunia bahwa Rusia akan memulai “operasi militer khusus” di Ukraina, menandakan dimulainya invasi skala penuh Rusia terhadap Ukraina. Invasi yang dilakukan Rusia kali ini tidak luput menuai berbagai kecaman dari hampir seluruh dunia. Sanksi internasional telah dijatuhkan selama Perang Rusia-Ukraina oleh sejumlah besar negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa sejak momentum aneksasi Krimea di tahun 2014 yang kemudian ditingkatkan akibat invasi yang terjadi di tahun 2022. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 ini, Amerika Serikat, UE, dan negara - negara lain secara signifikan memperluas sanksi untuk memasukkan Vladimir Putin dan anggota pemerintah lainnya ke dalam daftar penerima sanksi tersebut. Belarusia juga telah diberi sanksi atas kerjasama dan bantuannya kepada angkatan bersenjata Rusia yang juga dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan berbagai negara serta organisasi internasional dunia. Diantara sanksi yang harus dihadapi oleh Rusia salah satunya merupakan larangan total impor pangan dari Australia, Kanada, Norwegia, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Mereka juga memotong bank-bank Rusia yang dipilih dari SWIFT, sehingga pemboikotan Rusia dan Belarusia di tahun 2022 ini memicu krisis keuangan yang terjadi di Rusia (BBCNews, 2021).

Salah satu pihak yang berperan penting dalam inisiasi serangan Rusia terhadap Ukraina yakni presidennya, Vladimir Putin. Kentalnya nasionalitas yang dimiliki oleh

Vladimir Putin ini ternyata tidak pernah pudar dalam dirinya. Sebagai sosok yang berjasa besar bagi kebangkitan Rusia, tidak diragukan lagi bahwa Putin sangat memahami sejarah negaranya bahkan sebelum Uni Soviet mengalami keruntuhan. Rasa kecintaannya terhadap bangsa dan negara sangatlah kuat bahkan sampai lahir beberapa tindakan luar negeri Rusia yang terjadi sebagai *output* dari nasionalitas yang ada dalam diri presidennya. Perang yang terjadi terhadap Rusia - Ukraina juga tidak luput dari alasan nasionalitas. Rusia mendapat signal bahwa Ukraina memperlakukan beberapa bagian wilayah negaranya yang masih bagian dari bangsa slavia, hal ini diungkapkannya juga secara gamblang kepada Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan PBB (Kremlin, 2022).

Melihat fenomena kebangkitan Rusia menjadi hal yang menarik untuk membahas bagaimana perkembangan dan sejarah Rusia sebagai negara super power yang saat ini bersanding dengan Amerika Serikat dan China. Mengingat Rusia yang dahulu dikenal sebagai negara berideologi komunis bernama Uni Soviet, yang kemudian harus runtuh setelah momentum perang dingin dan menggantinya ideologi nya menjadi sebuah negara yang lebih liberal dan demokratis. Keterpurukan yang sempat dialami Rusia, tidak membuat negara ini kehilangan ambisi nya yang tinggi dalam upaya menjadi aktor yang pantas untuk di pertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan di politik internasional. Tentu hal ini dilatarbelakangi oleh kenangan sejarah Uni Soviet yang pernah menjadi aktor super power dan berpengaruh besar dalam politik internasional usai berakhirnya perang dunia II.

Menelaah kembali pada masa dunia memasuki era perang dingin (*cold war*) dimana terjadinya kondisi politik internasional yang bipolar dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai dua negara adi daya yang saling bersaing dan menyeimbangi kekuatan satu sama lain. Kedua negara tersebut memiliki *national interests* yang sama dimana mereka bertujuan untuk menyebarkan ideologi serta pengaruhnya di kancah internasional sehingga mampu menarik negara - negara yang berkekuatan lebih lemah untuk menjadi aliansi yang kuat. Bipolar adalah keadaan dimana sistem internasional berada dibawah dominasi dari dua negara super power yang memiliki kekuatan seimbang (Desch, 2013). Hal ini mengundang dampak lain, yakni, negara lain harus

beraliansi dengan salah satu dari kedua negara super power tersebut untuk mampu bertahan dan menciptakan kestabilan dalam politik internasional itu sendiri.

Hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat memanas usai Perang Dunia II. Kala itu Amerika Serikat dilanda kekhawatiran bilamana Uni Soviet berhasil mencapai kepentingannya dan menyebarkan ideologi komunis dan mendominasi dunia, sehingga mengancam eksistensi dari pengaruh Amerika Serikat. Lain hal dengan perspektif Uni Soviet, negara komunis ini menangkap signal dari segala pergerakan Amerika Serikat yang jelas menampakkan bahwa negaranya tidak menerima eksistensi Uni Soviet di dunia internasional, dan semakin menunjukkan bahwa kedua negara tersebut saling bersaing untuk mendominasi dunia (History, 2009).

Berakhirnya perang dingin ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet menjadi beberapa negara. Perang dingin yang terjadi dalam beberapa dekade silam akhirnya membuat Uni Soviet tidak mampu bertahan untuk menghadapi segala guncangan yang terjadi baik dari faktor eksternal maupun internal negaranya sendiri. Berkaca pada masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev di tahun 1985, Uni Soviet mengalami masalah perekonomian yang cukup hebat. Oleh karena itu, Gorbachev memublikasikan dua kebijakan baru yang disebut Glasnost *гласность* (keterbukaan politik) dan Perestroika *перестройка* (reformasi ekonomi) yang diharapkan dapat memperbaiki keadaan negaranya (Kompas, 2022). Namun, hal yang diharapkan tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi, dua kebijakan ini justru menjadi salah satu alasan runtuhnya Uni Soviet. Misalnya, kebijakan glasnost yang bertujuan untuk meminimalisir korupsi dan *abuse of power* dalam pemerintahan Uni Soviet, tetapi akibatnya media Uni Soviet justru dapat dengan bebas memublikasikan segala permasalahan di dalam negaranya yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat negara tersebut. Sedangkan Perestroika adalah kebijakan yang bertujuan untuk memereformasi birokrasi dan meningkatkan perekonomian dengan menghindari kebijakan secara terpusat yang justru berakibat pada perdebatan politik hebat sebab untuk pertama kalinya Uni Soviet memisahkan ideologi komunis nya dan membuka jalan bagi ekonomi kapitalisme baru.

Akibat runtuhnya Uni Soviet pun mengubah stabilitas dunia internasional yang semula bipolar menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai negara *super power*.

Sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989 kemudian dikenal sebagai Rusia hingga sekarang. Bukan hal yang mudah bagi Rusia untuk membangkitkan stabilitas negaranya dari keterpurukan. Pemimpin pertama Rusia adalah Presiden Boris Yeltsin, yang kemudian disusul Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev sebagai presiden setelahnya, dan disusul kembali dengan masa kepemimpinan Vladimir Putin yang bertahan hingga saat penelitian ini dikerjakan.

Boris Yeltsin berkuasa dengan gelombang harapan yang tinggi. Pada 12 Juni 1991 ia terpilih sebagai presiden Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia dengan 57% suara (Novinite, 2007), menjadi presiden pertama yang dipilih secara popularitas. Tetapi menjadi populer tidak menjamin Yeltsin mampu membawa kebangkitan bagi Rusia. Dibawah kepemimpinannya, Rusia berfokus pada perubahan ideologi yang semula komunis menjadi demokratis dan memiliki kebebasan ekonomi. Meskipun begitu, Yeltsin tidak pernah memulihkan popularitasnya setelah serangkaian krisis ekonomi dan politik di Rusia pada 1990-an. Era Yeltsin ditandai dengan korupsi yang meluas, keruntuhan ekonomi, dan masalah sosial politik yang sangat hebat.

Vladimir Putin menggantikan Yeltsin pada tahun 2000 yang kemudian menjadi balik kebangkitan Rusia. Putin sendiri menegaskan bahwa cita-cita utamanya adalah mengembalikan kejayaan Rusia di dunia internasional dan kembali menjadi negara *super power* seperti disaat Uni Soviet masih berdiri. Sepanjang masa kepresidenannya dan memasuki masa jabatan keduanya sebagai Perdana Menteri, Putin telah menikmati peringkat persetujuan yang tinggi di antara publik Rusia. Selama delapan tahun menjabat, ekonomi Rusia bangkit drastis dari krisis, melihat PDB meningkat enam kali lipat (72% dalam PPP), kemiskinan berkurang lebih dari setengah dan gaji bulanan rata-rata meningkat dari \$80 menjadi \$640, atau 150% dalam tingkat riil (Britannica, 2022). Pada saat itu Vladimir Putin sudah menjabat sebanyak 2x sebagai pemimpin Rusia, sedangkan Rusia sendiri memiliki kebijakan bahwasanya seorang presiden tidak dapat menjabat sebanyak 3x secara berturut, sehingga pada tahun 2008 Vladimir Putin digantikan oleh Dmitry Medvedev. Medvedev diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri Pertama pemerintah Rusia pada 14 November 2005. Sebelumnya menjabat sebagai kepala staf Vladimir Putin, ia juga menjabat sebagai ketua dewan direksi

Gazprom, sebuah jabatan yang ia pegang untuk kedua kalinya sejak tahun 2000. Pada 10 Desember 2008, ia secara informal disahkan sebagai kandidat untuk pemilihan presiden yang akan datang oleh partai politik terbesar Rusia, Rusia Bersatu, dan secara resmi disahkan pada 17 Desember 2008. Pencalonan Medvedev didukung oleh mantan Presiden Vladimir Putin dan partai-partai pro-presiden. Medvedev yang berhasil merebut kursi kepresidenan kemudian menghadihkan posisi perdana menteri untuk Putin yang dimana pengaruh Putin tetap tampak kental dalam kebijakan - kebijakan Rusia dibawah kepemimpinan Medvedev (Finoshina, 2016).

Fenomena masa jabatan seseorang untuk memimpin suatu negara lebih dari 3 periode merupakan kondisi yang tidak semua tokoh pemimpin mampu mencapainya, terutama jika membahas kepercayaan masyarakatnya dengan segala tantangan yang dihadapi pemimpin dan kondisi negara yang naik turun. Vladimir Putin adalah salah satu dari kelangkaan fenomena tersebut. Bukan hal yang harus dipertanyakan lagi mengapa masyarakat Rusia cukup menaruh kepercayaan pada Putin sebagai presiden Rusia dalam beberapa periode berturut - turut hingga saat ini. Pada periode pertamanya, Putin mampu memperbaiki kondisi perekonomian Rusia yang sangat tidak stabil kurun waktu 2000 sampai 2004. Periode keduanya, Putin mulai menunjukkan keberaniannya untuk mengkritik kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Putin sangat kritis dalam menganggapi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, ia menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada saat itu kurang bijak dan terkesan seenaknya, terlihat jelas dari pidato yang disampaikan Putin dengan menyebutkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara *super power* tunggal pada saat konferensi keamanan di Munich, Jerman. Dalam pidatonya, ia juga menyerukan tentang menciptakan sistem multi-polar dunia yang demokratis dengan hukum internasional sebagai pengatur utamanya (Yaroshevsky, 2015). Pada periode keduanya ini Putin banyak mendapat kritik dari media barat karena gaya kepemimpinannya dinilai otokrasi dan membatasi kebebasan pers. Putin tidak menghiraukan bagaimana penilaian dunia barat dan membalas dengan membuktikan pada dunia bahwa ia berhasil mengembalikan *public impression* Rusia sebagai aktor yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di kancah internasional.

Tidak berakhir disitu, pada masa kepemimpinan selanjutnya Putin tetap lihai memainkan perannya untuk unjuk diri sebagai pemimpin dari negara *super power*. Beredar media yang memberitakan bahwa Rusia akan menarik kembali pasukannya dari perbatasan Ukraina, namun hal itu jelas hanya wacana belaka sebab pasukan Rusia sama sekali tidak berpindah tempat dari wilayah Belarusia. Amerika Serikat bahkan menyebut bahwa klaim tersebut sebagai *reprehensible falsehood* atau kepalsuan yang tercela.

Sebagai peninggalan utama dari runtuhnya Uni Soviet, Rusia dibawah kepemimpinan Putin tetap memiliki hasrat untuk menyatukan kembali negara pecahan Uni Soviet, meski sempat dibantahnya pada pidato yang ia lakukan di pertengahan tahun 2022. Dengan tekad yang penuh Putin membuktikan tujuan awalnya menjadikan peninggalan utama Uni Soviet itu sebagai *state actor* yang mendominasi dunia. Dimulai dari pergerakannya untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan negara - negara tetangganya. Meskipun, hal ini tidak berjalan tanpa halangan dari faktor internal maupun eksternal. Rusia kerap mengalami konflik dengan negara - negara tersebut, salah satunya konflik dengan Ukraina yang menyita perhatian masyarakat internasional pada tahun 2014 dengan adanya invasi wilayah Krimea.

Krimea yang secara internasional diakui sebagai wilayah milik Ukraina, sempat menghadapi konflik internal hingga terjadi kekacauan besar. Melihat kondisi yang terjadi di wilayah Ukraina ini, Putin menyadari bahwa adanya sebuah peluang untuk memenangkan hati masyarakat krimea dengan menyebarkan pengaruhnya agar mereka sepakat bergabung dengan Rusia. Kemudian Rusia semakin menunjukkan intervensi lebih jauh ke dalam konflik Ukraina dengan mengerahkan pasukan militer ke Krimea dan perbatasan Ukraina pada tanggal 1 Maret 2014. Pada tanggal 16 Maret diadakan referendum terkait status Krimea dan kota Sevastopol. Referendum tersebut berakhir dengan 96.7% rakyat Krimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia. Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2014, Pemerintah Rusia resmi menandatangani undang-undang yang memasukkan wilayah semenanjung Krimea sebagai subjek federal baru Rusia. Melihat Tindakan ini tentunya Ukraina dan masyarakat dunia menganggap bahwa Rusia telah melakukan sebuah aneksasi atau

merampas wilayah sebuah negara yang dimana hal ini dianggap ilegal dan tidak sah bagi hukum internasional. Hal ini menjadi salah satu akar dari ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang tidak berkesudahan hingga di tahun 2022 Rusia memutuskan untuk melancarkan serangan ke kota-kota besar Ukraina.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana latar belakang biografi dan bahwasanya sejarah telah mempengaruhi gaya kepemimpinan serta kebijakan yang diambil oleh seorang *decision maker*. *Decision maker* atau pemangku kebijakan adalah aktor yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk membuat sebuah keputusan. Di dalam sebuah sistem politik, pembuat keputusan dapat berupa seorang presiden, raja, perdana menteri, ataupun pejabat tinggi lainnya yang memiliki kekuasaan, hak maupun kewajiban untuk membuat suatu kebijakan. Jika melihat Rusia sebagai sebuah negara, maka seorang yang paling tepat disandang sebagai pemangku kebijakan disini adalah presidennya, yaitu Vladimir Putin. Presiden dari salah satu negara pecahan terkuat Uni Soviet ini sangat dikenal diseluruh dunia. Kharisma serta sifatnya yang gigih membuat ia mampu menjadi tokoh nomor satu di Rusia, sebagai seorang presiden Rusia dengan masa jabatan paling panjang selama Rusia berdiri setelah pecahnya Uni Soviet. Tidak bisa dipungkiri, Putin merupakan sosok pemimpin yang mampu mengembalikan keadaan Rusia dari keterpurukan usai Perang Dunia II hingga kembali menjadi salah satu negara adi daya saat ini.

Sebelum memasuki argumentasi tentang bagaimana idiosinkratik Putin telah mempengaruhi kebijakannya terkait invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, perlu untuk diketahui apa yang dimaksud dengan *Foreign Policy* atau **Politik Internasional**. Sebagai suatu kajian pokok dalam ilmu Hubungan Internasional, Politik Internasional memiliki kajian yang mencakup segala bentuk hubungan atau interaksi antara aktor global dalam mencapai *national interest* nya. Ruang lingkup politik internasional terbatas pada permainan kekuasaan antara negara-negara berdaulat di kancah internasional (Affianty, 2016). Menurut (Jack C. Plano, 1969), Kebijakan luar negeri adalah strategi, arah atau tindakan yang direncanakan sekaligus dikembangkan oleh para pembuat keputusan di suatu negara terhadap negara lain atau entitas

internasional, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang ditentukan dalam kepentingan nasional.

Relevan dengan pandangan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani yang menyebutkan dalam karya mereka bahwa, Politik Internasional diartikan sebagai strategi suatu negara ketika berurusan dengan negara lain berdasarkan indikator seperti nilai, sikap, arah atau tujuan serta sasaran untuk mampu mempertahankan dan mencapai kepentingan nasional negara tersebut secara internasional (Yanyan Mochammad Yani, 2006). Sehingga hakikatnya setiap negara memiliki strategi dan gaya berpolitik internasionalnya masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan kepentingan nasional dari masing-masing negara yang terlibat didalamnya. Kemudian, dibahas oleh Leonard F. Hutabarat dalam jurnal artikelnya yang mengangkat penelitian tentang kebijakan luar negeri Rusia dan integrasi EURASIA, tertulis bahwa Putin menekankan aspirasi dalam mengintegrasikan kembali negara - negara pecahan Uni Soviet ke dalam suatu kesatuan yang mengikat berdasarkan nilai - nilai, serta fondasi ekonomi dan politik yang baru (Hutabarat, 2017). Topik yang diangkat oleh Leonard Hutabarat tersebut memberikan pandangan mengenai bagaimana setiap negara mempunyai strategi, cara dan pendekatannya masing - masing untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang tidak luput pula dilakukan oleh Rusia sebagai aktor internasional. Proses konversi perumusan Politik Internasional suatu negara tidak luput mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai beserta sarana dan kapabilitas yang tersedia. Output dari perumusan Politik Internasional dikenal sebagai kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri menjadi tanggung jawab penuh seorang pemimpin negara. Melalui pemimpinnya negara bisa saja mengeluarkan kebijakan untuk melancarkan serangan, menciptakan perdamaian, membentuk hubungan diplomatik, memberikan sikap dalam soal non proliferasi nuklir, menjatuhkan sanksi ekonomi, membuat kubu politik baru, hingga melakukan ratifikasi terhadap masalah lingkungan global. M. Syaprin Zahidi dalam jurnalnya menyebutkan bahwa rumusan kebijakan luar negeri suatu negara untuk menanggapi isu yang terjadi di dunia internasional tidak

bisa lepas dari bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam negara tersebut (Zahidi, 2020).

Dijelaskan secara lebih signifikan tentang indikasi yang menjadi poin utama terciptanya perbedaan proses dan hasil dari perumusan kebijakan luar negeri setiap negara dalam penelitian yang berjudul *understanding foreign policy decision making* oleh Alex Mint dan rekannya Karl DeRouen menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, ada yang disebut ***foreign policy decision making***. Alex Mint dan Karl DeRouen memberikan pandangan untuk memahami proses perumusan kebijakan dapat ditelaah melalui jenis keputusan (*one-shot, sequential, dan interactive group*), tingkat analisa pengambilan kebijakan luar negeri (individu, grup, dan koalisi), proses serta dinamika yang mengarah kepada keputusan, kesalahan kognitif, bias, hingga model pengambilan keputusan (*rational actor, cybernetic, bureaucratic politics, organizational politics, poliheuristic theory dan prospect theory*). Pendekatan ini berfokus pada proses keputusan, dinamika, dan hasil dengan menyoroti peran faktor psikologis dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri dapat dirumuskan sebagai aksi yang *impulse driven* (emosional), *ends-means* (instrumental), dan *inter-action oriented* (strategik). Melalui literatur ini penulis dalam memahami langkah dasar untuk menganalisa kebijakan luar negeri melalui pendekatan psikologi atau individual dari Vladimir Putin, seperti mengenal macam - macam model dalam pengambilan kebijakan, prosedur analisa atau *Applied Decision Analysis*, faktor - faktor yang membentuk sebuah keputusan baik domestik maupun internasional, hingga bagaimana cara Putin mampu mendapatkan dukungan publik terhadap kebijakan yang ia ciptakan (Alex Mintz, 2010).

Dalam penelitiannya, Alex Mint menyangkal stigma tentang pemimpin harus mengemukakan sebuah kebijakan berdasarkan pendekatan rasional, karena menurutnya, pendekatan psikologi seorang pemimpin tidak luput mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat. Asep Setiawan memiliki pandangan yang sejalan melalui bukunya yang berjudul pengantar studi Politik Internasional, bahwa FPDM merupakan kunci dalam menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara yang merujuk kepada pilihan individual, koalisi, maupun kelompok. Dimana setiap aktor pengambil

keputusan dapat menentukan hasil yang berbeda meski dihadapkan dengan isu yang sama.

Meskipun Putin menjadi presiden terlama memimpin negara yang lahir sebagai dampak dari runtuhnya Uni Soviet, Rusia tetap mengalami masa pergantian periode kepemimpinan. Pemimpin yang berbeda tentunya menciptakan jejak sejarah berbeda juga bagi Rusia. Berdasarkan jurnal yang berjudul *Decision-making in Russia's Foreign Policy Modelling Russia's Decision-Making with reference to Ukraine and Moldova (2004-2018)* karya Kristine Zaidi, penelitiannya menyebutkan bahwa pengambilan keputusan atas Ukraina sebagian besar tetap berada di tangan presiden untuk menetapkan arah utama dan mempertahankan kendali atas implementasi yang pada masa itu Rusia dipimpin oleh Putin. Kristine berpendapat bahwa pada masa pemerintahan Putin ini, strategi kepentingan nasional Rusia tetap konsisten serta analisis terkait modifikasi tujuan yang arahnya tetap konsisten (Zaidi, 2021). Tercipta hubungan sebab akibat yang jelas antara tujuan, sasaran, dan keputusan, baik yang mendasar maupun tambahan. Jurnal ini berfokus pada penelitian pengambilan kebijakan Rusia sebagai state actor di kancah internasional, perbedaan pada penelitian kali ini ialah idiosinkratik Putin akan diteliti secara komprehensif berdasarkan historical data yang mendukung.

Penelitian terhadap Boris Yeltsin yang juga sempat menjabat sebagai presiden Rusia ini menunjukkan hal yang berbeda. Menurut jurnal yang berjudul pengaruh demokratisasi terhadap pembangunan ekonomi di Rusia pada masa pemerintahan Boris Yeltsin karya Phita Crystalia Pramestiw, Supriyadi, dan Adhiningasih Prabhawati, (Phita Crystalia Pramestiw, 2014) menyebutkan bahwa kondisi Rusia pada saat itu mengalami kemunduran akibat ketidakstabilan politik maupun ekonominya. Terjadi krisis ekonomi yang cukup parah di tahun 1998 dan adanya penurunan pendapatan negara, kenaikan tingkat inflasi, jumlah pengangguran yang meningkat, dan utang luar negeri Rusia yang semakin memperburuk keadaan. Kedua penelitian yang menganalisis kondisi Rusia dari dua presiden yang berbeda menunjukkan signifikansi dengan literature review yang disuguhkan sebelumnya, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara juga besar dipengaruhi oleh aspek individu dari pembuat keputusan

tersebut, dalam hal ini dapat dipengaruhi oleh nilai - nilai yang ia bawa, cara pandangnya, latar belakang dan pengalaman, gaya kepemimpinannya, serta faktor pendukung lainnya yang bersifat individual.

Sebagai indikator penting dalam analisis kebijakan luar negeri suatu negara berdasarkan pemangku kebijakannya, perlu untuk mengenali faktor idiosinkratik dan latar belakang dari *decision maker*. Dalam kebijakan luar negeri, ada yang namanya proses penetapan fokus penelitian yang disebut sebagai *level of analysis*. Yessi Olivia dalam jurnalnya menyebutkan bahwa ada tiga level analisis, salah satunya berfokus pada penelitian level individu yang merujuk pada pemangku kebijakan atau *decision maker*. Dimana level analisis ini mampu menjawab bagaimana faktor idiosinkratik seorang Putin berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri Rusia, dalam penelitian kali ini merujuk pada studi kasus perang dengan Ukraina (*idiosyncratic behavior*) (Yessi Olivia, 2013). Analisis kepribadian Putin kerap menjadi topik penelitian yang menarik bagi peneliti dari seluruh penjuru dunia, namun sejauh ini penelitian yang disuguhkan terbilang masih kurang dieksplorasi dari beragam metode analisis yang ada dalam ilmu Hubungan Internasional. Seperti jurnal yang diteliti oleh Lismi Salis dan rekan - rekannya dengan judul kepemimpinan presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam jurnalnya, mereka menjawab rumusan masalah terkait bagaimana tipe kepemimpinan seorang Putin, yakni karismatik dan transformasional. Sedangkan, pada penelitian kali ini penulis akan menjawab masalah tentang bagaimana pengaruh kepribadian Putin terhadap cara kepemimpinannya sehingga menciptakan implikasi pada kebijakan luar negeri Rusia (Lismi Salis, 2019).

Konsep idiosinkratik juga dibuktikan melalui beberapa jurnal penelitian yang dilakukan oleh Tania Dwi Tamara bersama Ismah Rustam dan Zulkarnain mengenai kepemimpinan Ma Ying Jeou (2008-2012) (Tania Dwi Tamara, 2020), Femmyoroi Mutiara Ayu berikut dengan rekannya Penny Kurnia Putri dan Anak Agung Ayu Intan Parameswari yang mengangkat topik idiosinkratik dari putra mahkota Muhammad Bin Salman (Femmyoroi Mutiara Ayu, 2022), yang juga sependapat dengan hasil penelitian idiosinkratik Shinzo Abe oleh Dinda Arumsari Laksono (Laksono, 2018) yang menyatakan bahwa konsep idiosinkratik adalah konsep turunan dari teori kebijakan

luar negeri yang melihat pada aspek kepemimpinan seorang individu yang mengkaji latar belakang kehidupan mereka berdasarkan beberapa faktor seperti faktor lingkungan, psikologi, maupun faktor yang datang dari domestik suatu negara hingga internasional.

Sedangkan, penelitian serupa pernah dilakukan oleh Muhammad Gilang Rihardika melalui skripsinya tentang pengaruh faktor kepribadian Vladimir Putin terhadap Politik Internasional Rusia pada kasus Krimea (Rihardika, 2017). Penelitian tersebut membahas idiosinkratik Putin hanya berdasarkan kasus aneksasi yang dilakukan Rusia pada kawasan Krimea di tahun 2014, skripsi tersebut hanya menguraikan masa pemerintahan Putin sejak tahun 2000 - 2018 sehingga dirasa kurang relevan lagi mengingat hingga tahun 2024 Putin masih menjabat sebagai presiden Rusia untuk periode ke-4 nya.

Melalui penelitian ini penulis menyajikan analisis kepemimpinan Vladimir Putin melalui upaya politik internasional yang dilakukannya sehubungan dengan perang Rusia-Ukraina 2021-2023. Berdasarkan jurnal karya Abdulmelik Alkan yang membandingkan idiosinkratik presiden Turki yakni Recep Tayyip Erdogan dengan Vladimir Putin melalui pendekatan *small theory* membuktikan bahwa teori ini masih sangat relevan dan efektif dalam menganalisis kepemimpinan seorang *decision maker* (Alkan, 2021). Namun, pada jurnal yang dibuat Abdulmelik tidak memaparkan uraian analisis kepemimpinan Vladimir Putin melalui kebijakan politik internasionalnya.

Politik internasional Vladimir Putin dinilai agresif dan sangat optimis dalam melakukan misi - misinya demi mencapai kepentingan dan tujuan Rusia dalam berinteraksi dengan aktor internasional. Semenjak Putin menjabat sebagai presiden, Rusia mulai bangkit perlahan agar mampu menunjukkan kekuatannya di kancah internasional. Beragam kebijakan luar negeri yang dinilai sangat berani telah ia tunjukkan pada masyarakat dunia tanpa peduli walaupun harus menerima kecaman hingga sanksi ekonomi yang membawa krisis moneter di dalam negaranya, meski setelahnya ia kembali berhasil menjaga kestabilan domestik pada masyarakat Rusia. Sehingga berdasarkan literature review yang dibahas sebelumnya menjawab bagaimana politik internasional Rusia dipengaruhi oleh bagaimana kepemimpinan

pemimpinnya, yakni Vladimir Putin. Pembeda penelitian yang berjudul “ANALISIS KEPEMIMPINAN VLADIMIR PUTIN DALAM KEBIJAKAN PERANG RUSIA-UKRAINA 2021-2023: PENDEKATAN SMALL THEORY: HOLSTI” berupaya untuk memberikan pandangan yang lebih relevan bahwa faktor kepemimpinan seorang *decision maker* sangat berpengaruh dalam proses politik internasional yang dirumuskan oleh suatu negara, yang dalam penelitian kali ini menganalisis politik internasional Rusia melalui Vladimir Putin sebagai presidennya.

Sosok Putin yang tegas dan berani mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh Rusia. Saat Ukraina mengalami krisis besar - besaran yang tepat terjadi di Krimea pada tahun 2014, terjadi invasi pasukan tanpa nama yang menduduki gedung - gedung pemerintahan di Krimea yang merupakan pasukan Rusia, Putin tidak segan mengerahkan pasukannya untuk menganeksasi Krimea yang merupakan wilayah kepemilikan sah Ukraina secara hukum internasional untuk membuat Rusia diperhitungkan sebagai negara adidaya. Sejak momentum aneksasi Krimea pada tahun 2014 oleh konflik internal Ukraina yang kemudian membuat Rusia mengambil peluang untuk menyebarluaskan pengaruhnya kepada masyarakat krimea, hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi semakin tidak sehat. Hingga pada akhir tahun 2021 Rusia mulai merealisasikan rencananya untuk menyerang wilayah Ukraina sebagai langkah dalam menguatkan pertahanan negaranya dengan melumpuhkan musuh terlebih dahulu sebelum mereka mulai melancarkan sebuah serangan yang tentunya akan sangat merugikan dan mengganggu stabilitas keamanan nasional Rusia. Dunia internasional dan Ukraina sendiri menganggap bahwa tindakan Rusia merupakan sebuah pelanggaran dari Hukum Internasional dengan melakukan serangan terhadap wilayah suatu negara yang tidak hanya mengganggu stabilitas dan keamanan negara - negara tetangganya namun juga akan merusak perdamaian dunia. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rusia dibawah kepemimpinan Vladimir Putin ini membuktikan bahwa Putin memang serius terhadap targetnya untuk membuat Rusia kembali berjaya di dunia internasional dengan perluasan dominasinya yang dimulai dari negara - negara tetangga terutama Ukraina.

Rusia sendiri memiliki sejarah yang panjang sebagai negara adidaya yang harus membangun kembali kejayaannya semenjak momentum runtuhnya negara Uni Soviet diakhir perang dingin. Terbukti tidak semua pemimpin dapat dengan mudah membangkitkan kembali kesuksesan negara bekas Uni Soviet ini. Berawal dari kepemimpinan presiden Yeltsin yang terbukti gagal sebab tidak mampu menahan tekanan sebagai pemimpin sebuah negara besar, baik dari faktor internal negaranya maupun faktor eksternal. Selanjutnya Vladimir Putin dipercayai untuk menggantikan pemimpin sebelumnya semenjak tahun 2000. Sejak awal masa kepemimpinannya, Putin kerap menegaskan bahwa tekadnya untuk mengembalikan kejayaan Rusia yang telah lama hilang dari kendali negaranya, terutama untuk membuat Amerika Serikat tidak lagi sendiri menjadi sebuah negara *super power* di mata dunia internasional.

Level Individu merupakan aspek dasar untuk mempertimbangkan perumusan kebijakan luar negeri. Analisis kepribadian terhadap pemimpin suatu negara mampu memberikan pandangan terhadap negara lain dalam bertindak di kancah internasional. Kepemimpinan menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif melalui beragam metodologi pendukung agar mampu memahami cara pandang, nilai, prinsip, hingga bagaimana seorang *decision maker* akan bertindak berdasarkan isu internasional yang sedang dihadapi. Analisis kepemimpinan seorang pemangku kebijakan sebuah negara tidak luput menjadi faktor pendukung untuk menemukan tindakan preventif bagi negara lain ketika harus berhadapan dengan pemimpin negara tersebut. Termasuk analisis tentang gaya kepemimpinan Vladimir Putin yang akan sangat menambah bahan pembelajaran dalam kajian ilmu Hubungan Internasional. Penelitian kali ini mengangkat tema mengenai kepemimpinan Vladimir Putin dalam politik internasional Rusia yang menginvasi Ukraina pada tahun 2021-2023. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni, dari segi pendekatan analisis, penelitian ini juga akan dibangun berdasarkan argumentasi penelitian pada jurnal - jurnal terdahulu. Jurnal penelitian terdahulu berpeluang untuk dielaborasikan sebagai langkah dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian terkait analisis kepemimpinan Vladimir Putin. Peneliti melakukan pendekatan dengan studi kasus yang tidak dibahas pada jurnal penelitian yang sudah ada yakni, pendekatan *small theory* menggunakan teori

kepemimpinan Holsti. Karenanya, penulis mengangkat judul “ANALISIS KEPEMIMPINAN VLADIMIR PUTIN DALAM KEBIJAKAN PERANG RUSIA-UKRAINA 2021-2023: PENDEKATAN SMALL THEORY: HOLSTI”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas mengenai kepemimpinan Vladimir Putin melalui pendekatan *small theory*; teori kepemimpinan Holsti dengan menelaah kebijakan Vladimir Putin dalam melakukan politik internasional Rusia dalam studi kasus perang Rusia-Ukraina 2021-2023 dengan memfokuskan pada pertemuan-pertemuan yang dilakukan Vladimir Putin dengan aktor negara internasional pada sebelum dan saat perang berlangsung. Politik Luar Negeri terjadi tentu mempunyai tujuan dan motivasi dari negara yang melakukannya, terutama dalam mencapai kepentingan nasional yang dirumuskan oleh pemangku kebijakan sebuah negara. Dalam menentukan politik internasionalnya, setiap pemimpin negara memiliki gaya kepemimpinan dan *point of view* yang berbeda dalam menanggapi isu yang terjadi terutama karena melibatkan aktor negara lain di kancah internasional. Layaknya negara pada umumnya, Rusia pun memiliki tujuan dan motivasi yang jelas dalam melakukan dan menentukan arah politik internasionalnya. Rusia sendiri memiliki sejarah yang panjang sebagai negara adidaya yang harus membangun kembali kejayaannya semenjak runtuhnya Uni Soviet diakhir perang dingin. Terbukti tidak semua pemimpin dapat dengan mudah membangkitkan kembali kesuksesan negara bekas Uni Soviet tersebut.

Berawal dari kepemimpinan presiden Yeltsin yang terbukti gagal sebab tidak mampu menahan tekanan sebagai pemimpin sebuah negara besar, baik dari faktor internal maupun eksternal. Selanjutnya Vladimir Putin dipercayai untuk menggantikan pemimpin sebelumnya semenjak tahun 2000. Sejak awal masa kepemimpinannya, Putin kerap menegaskan bahwa tekadnya untuk mengembalikan kejayaan Rusia yang telah lama hilang dari kendali negaranya, terutama untuk membuat Amerika Serikat tidak lagi sendiri menjadi sebuah negara *super power* di mata dunia internasional. Dalam berbagai kesempatan Putin selalu menegaskan bahwa ia akan menjaga keutuhan bangsanya, dan setelah upaya yang dilakukannya untuk membangkitkan keadaan Rusia

kembali, tentu ia akan melakukan segala hal untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas keamanan negaranya. Di banyak isu internasional, Putin menunjukkan bahwa ia bukanlah aktor internasional yang memfokuskan perang atau kekuatan militer sebagai sebuah cara utama untuk menyelesaikan permasalahan internasional, baik yang berhubungan dengan negaranya maupun dalam merespon isu yang sedang dialami oleh negara-negara internasional lainnya. Menganalisis segala kegiatan politik internasional yang diupayakan oleh Vladimir Putin pada masa sebelum dan saat perang Rusia-Ukraina 2021-2023 akan menjawab bagaimana kepemimpinan Vladimir Putin mengacu pada teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Holsti. Oleh sebab itu penulis mengangkat pertanyaan yakni, Bagaimana kepemimpinan Vladimir Putin berdasarkan teori kepemimpinan Holsti dalam politik internasional Rusia melalui perang Rusia-Ukraina 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan bahwa kepemimpinan yang dimiliki pemangku kebijakan sangat berpengaruh dalam proses politik internasional suatu negara. Dimana penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan contoh dari penerapan politik internasional yang kerap kali dijadikan sinonim dengan politik luar negeri, salah satu upaya yang dilakukan oleh Vladimir Putin dalam melakukan politik internasional dalam urusan perang Rusia – Ukraina 2021-2023 adalah dengan melakukan berbagai pertemuan dengan aktor negara lain pada sebelum dan saat perang tersebut berlangsung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara praktis, yakni untuk memberikan sebuah pandangan dalam upaya memahami aspek kepribadian sebagai penentu gaya kepemimpinan dari pemangku kebijakan yang dalam penelitian ini dicontohkan oleh presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, khususnya bagi negara Indonesia agar tetap menjaga hubungan kerja sama dengan Rusia serta memilih pendekatan yang tepat dalam menjalin sinergi melalui pemimpinnya.

2. Manfaat secara akademis, memberikan sebuah gagasan baru untuk dunia pendidikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian mengenai kepemimpinan dari seorang tokoh dunia. Dalam penelitian ini menggambarkan kepemimpinan Vladimir Putin yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia sehingga terjadinya peperangan dengan Ukraina yang memakan korban jiwa antar kedua negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan isi tulisan agar dapat lebih mudah dipahami secara menyeluruh dan detail, penulis akan membagi alur pemikiran berdasarkan tulisan ini menjadi 5 (lima) bab dengan sejumlah sub-bab yang berkaitan. Bab tersebut diantaranya:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini memaparkan penjelasan mengenai isu yang diambil sekaligus menjadi landasan awal penulis menjadikan topik ini menarik untuk dibahas. Bab ini memberikan eksplanasi mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat baik secara akademis maupun praktis serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan teori - teori yang relevan untuk digunakan sebagai pendekatan analisis topik penelitian skripsi, konsep beserta alur pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teknik yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian. Teknik - teknik yang dimaksud antara lain, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV BIOGRAFI VLADIMIR PUTIN DAN PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN RUSIA

Pada bab ini penulis akan menguraikan perjalanan hidup Vladimir Putin yang membentuk kepribadian yang menentukan gaya kepemimpinannya dalam politik internasional terkait perang Rusia – Ukraina 2021-2023 hingga bagaimana sistem

politik dan perkembangan sistem pemerintahan Rusia yang telah berjalan berdasarkan faktor ekonomi, sosial budaya, keamanan, Politik Internasional hingga beberapa teori sebagai *supporting indicators* yang mampu menjelaskan *existence of Russia* di kancah internasional melalui kepemimpinan Putin. Poin ini diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat faktor latar belakang dari kepemimpinan Vladimir Putin yang muncul dalam upaya eksekusi politik internasional Rusia sehingga mempengaruhi cara pandangnya dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan studi kasus yang penulis angkat pada penelitian kali ini.

BAB V ANALISIS KEPEMIMPINAN VLADIMIR PUTIN DALAM PERANG RUSIA – UKRAINA 2021-2023 PENDEKATAN SMALL THEORY: HOLSTI

Pada bab ini penulis akan masuk pada studi kasus yakni, invasi Rusia terhadap Ukraina di tahun 2022. Diawali dengan dinamika konflik Rusia-Ukraina dari akar permasalahan yang terjadi di masa lalu, konflik penganeksasian wilayah Krimea, latar belakang perang Rusia-Ukraina di tahun 2022 hingga dampak yang ditimbulkan dari perang tersebut dalam konteks beberapa sanksi terhadap Rusia yang dapat penulis jabarkan. Setelahnya, penulis akan mulai menganalisis studi kasus yang berfokus pada pertemuan – pertemuan yang dilakukan oleh Vladimir Putin dengan aktor atau petinggi negara – negara sekutunya dalam upaya penerapan politik internasional baik sebelum dan saat perang Rusia – Ukraina 2021-2023 terjadi, kemudian penulis menganalisis aspek – aspek tersebut melalui pendekatan *small theory*; Holsti.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik sebuah kesimpulan dari penelitian yang disertai dengan solusi dan kritik singkat serta saran oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian Daftar Pustaka berisi tentang referensi baik jurnal, website maupun buku yang dijadikan basis dalam menjawab pertanyaan penelitian.